**PEMBANGUNAN EKONOMI UNTUK MEWUJUDKAN
MASYARAKAT YANG SEJAHTERA
DI SULAWESI TENGAH**

**Pidato Pengukuhan Guru Besar
Bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Tadulako**

Disampaikan dalam Sidang Terbuka Senat Akademik
Universitas Tadulako
Tanggal 23 Januari 2025

Oleh:

Prof. Dr. H. Muhtar Lutfi. DP, S.E., M.Si

**UNIVERSITAS TADULAKO
PALU – SULAWESI TENGAH
2025**

Bismillahir Rahmanir Rahiim
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Terhormat;

- Ketua dan Anggota Dewan Penyantun Universitas Tadulako
- Rektor Universitas Tadulako & para Wakil Rektor Universitas Tadulako
- Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Universitas Tadulako
- Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako
- Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Profesor Universitas Tadulako
- Ketua, sekretaris dan Anggota Satuan Pengawasan Internal Universitas Tadulako
- Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Bagian, Kasubag, dan Staf Unit Kerja dalam lingkup Universitas Tadulako
- Para Dekan, Direktur Pascasarjana, wakil Dekan, Asisten Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi dalam lingkup Universitas Tadulako
- Ketua dan Anggota Dharma Wanita Unit Universitas Tadulako
- Para Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Tadulako
- Para Undangan, Civitas Akademika Universitas Tadulako yang saya muliakan.

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini, dalam rapat senat terbuka luar biasa Universitas Tadulako. Shalawat dan taslim selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Merupakan satu kebanggaan bagi saya dan keluarga serta civitas akadaemik Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pada hari ini diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato pengukuhan penerimaan jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako dihadapan Ketua, Anggota Senat dan para undangan yang saya muliakan.

Suatu kehormatan serta tanggung jawab yang demikian besar atas penganugerahan jabatan Guru Besar yang disematkan kepada saya yang harus diemban guna kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu Ekonomi Pembangunan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati izinkan saya untuk menyampaikan Orasi Ilmiah di forum terhormat ini, dengan tema: **Pembangunan Ekonomi Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera di Sulawesi Tengah.**

Hadirin yang saya muliakan

Pembangunan harus dipahami sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang lebih baik. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di berbagai sektor ekonomi dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional maupun daerah semakin besar.

Todaro (2011:27), mengemukakan pembangunan harus memiliki tujuan yang satu sama lain saling terkait, yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan dasar, seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat.
2. Mencapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian. Aspek ini meliputi peningkatan kesejahteraan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan budaya serta nilai kemanusiaan.

Dari berbagai publikasi resmi, bahwa pemerintah mengklaim telah berhasil dalam penyelenggaraan pembangunan. Keberhasilan dimaksud indikatornya, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penurunan jumlah penduduk miskin dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Keberhasilan yang dicapai pemerintah tersebut apakah telah memberikan dampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini, hal ini akan kita lihat pada data-data yang disajikan oleh BPS.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa tahun terakhir kinerja pembangunan ekonomi di daerah Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi bahkan tertinggi kedua setelah Propinsi Papua Barat dengan pertumbuhan 9,08 persen pada tahun 2024. Pada sisi yang lain, jumlah masyarakat miskin di Sulawesi Tengah tahun 2024 mencapai 379.760 jiwa dengan tingkat kemiskinan ekstrim mencapai 1,27 persen (BPS. 2024). Tentunya menjadi pertanyaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi apakah dinikmati oleh masyarakat atau tidak.

Berdasarkan fakta tersebut, bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Seperti dikatakan berbagai pakar, bahwa meskipun kebijakan ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan yang tepat dan dan

terjadinya modernisasi ekonomi, namun ternyata masalah-masalah kemiskinan dan ketertinggalan yang sangat besar tidak dapat diatasi hanya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Meskipun tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi, namun kemiskinan tetap menjadi masalah yang sangat besar (Midgley dan Conley, 2010). Lebih lanjut dikemukakan Van Roy, F (1997), bahwa pembangunan tidaklah sesederhana persoalan pertumbuhan, tapi merupakan perwujudan keseluruhan faktor-faktor sosial ekonomi yang kompleks. Jika pembangunan akan mencapai tujuan dan berkelanjutan, faktor-faktor tersebut harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Indikator Hasil Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah

Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif yakni pada tahun 2019 LPE sebesar 8,83 persen menurun menjadi 4,86 persen pada tahun 2020, pada tahun 2021 LPE meningkat menjadi 11,70 persen, dan kembali meningkat menjadi 15,17 persen pada tahun 2022, serta pada tahun 2023 LPE sedikit mengalami perlambatan hingga menjadi 11,91 persen sebagai konsekuensi melemahnya perdagangan dunia. Pada tahun 2024 LPE Provinsi Sulawesi Tengah tinggal sebesar 9,08 persen (BPS, 2025). Dari indikator pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan bahwa kondisi perekonomian daerah ini mengalami perlambatan selama tiga tahun terakhir, walaupun di Tingkat nasional masih menunjukkan angka laju pertumbuhan yang sangat tinggi dibanding Provinsi lainnya.

Menarik untuk dicermati bahwa pertumbuhan yang dicapai tersebut jika ditinjau dari aspek laju pertumbuhan ekonomi antar daerah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, menunjukkan ketimpangan yang sangat tinggi, dimana terdapat daerah yang pertumbuhan ekonominya sangat tinggi yaitu Kabupaten Morowali dan Morowali Utara dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai lebih dari 20 persen pada tahun 2023 sedangkan daerah lainnya kurang dari 5 persen (BPS, 2024). Hal ini juga mengindikasikan bahwa Pembangunan daerah di wilayah ini terjadi ketimpangan yang jika tidak segera dicarikan solusinya akan berdampak buruk bagi Pembangunan ekonomi di wilayah Sulawesi Tengah.

Berikut Gambaran laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Terlihat bahwa dua daerah yang sangat tinggi laju pertumbuhannya yaitu Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara serta dua kabupaten yang laju pertumbuhannya sangat rendah, yaitu Kabupaten

Banggai dan Kabupaten Banggai.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	Kabupaten Banggai Kepulauan	4,02	-2,36	5,07	4,94	3,94
2	Kabupaten Banggai	5,94	-4,80	1,75	6,90	2,40
3	Kabupaten Morowali	20,26	28,74	25,28	28,4	20,34
4	Kabupaten Poso	6,20	-3,94	4,86	3,64	3,82
5	Kabupaten Donggala	4,45	-4,26	4,64	3,86	4,68
6	Kabupaten Tolitoli	4,79	-3,39	4,36	3,64	3,52
7	Kabupaten Buol	2,14	-2,89	4,88	3,66	3,59
8	Kabupaten Parigi Moutong	2,21	-4,95	4,67	3,71	3,50
9	Kabupaten Tojo Una-Una	4,74	-3,17	4,25	3,46	3,34
10	Kabupaten Sigi	3,64	-1,50	5,66	3,33	3,37
11	Kabupaten Banggai Laut	3,50	-3,97	4,37	4,09	3,77
12	Kabupaten Morowali Utara	5,18	-0,23	10,56	36,37	23,04
13	Kota Palu	5,65	-4,43	5,97	4,32	4,96

Sumber: BPS, 2024

Indikator keberhasilan Pembangunan yang juga perlu mendapat perhatian adalah jumlah penduduk miskin suatu daerah. Sejauh mana keberhasilan Pembangunan suatu daerah, satu diantaranya ditandai dengan semakin berkurangnya penduduk miskin daerah tersebut.

Tabel 2. Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024

NAMA	Jml Penduduk Miskin (dalam ribuan)	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis emiskinan (Rp/Kap/Bulan)
Banggai Kepulauan	14,86	12,32	1,26	0,22	453.552
Banggai	26,21	6,56	0,86	0,17	515.334
Morowali	14,99	11,55	1,79	0,43	590.027
Poso	39,63	14,23	1,97	0,45	620.267
Donggala	47,68	15,30	3,00	0,75	438.396
Toli-Toli	30,39	12,45	1,73	0,42	441.975
Buol	23,05	13,08	2,20	0,47	477.640
Parigi Moutong	74,57	14,20	3,36	1,08	553.012
Tojo Una-Una	26,12	16,36	2,04	0,40	622.000
Sigi	29,80	12,06	2,52	0,70	463.011
Banggai Laut	11,16	13,78	1,76	0,35	443.877
Morowali Utara	16,74	11,95	1,89	0,39	594.137

Kota Palu	24,57	5,94	0,65	0,09	658.112
Sulawesi Tengah	379,76	11,77	2,10	0,53	600.872

Sumber: BPS, 2024

Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 mencapai 3.086.700 jiwa (BPS, 2024). Dari jumlah penduduk tersebut, yang masuk dalam kategori penduduk miskin sebanyak 379.760 jiwa atau sebanyak 11,77 persen dari total penduduk daerah ini, jumlah yang menunjukkan penduduk miskin yang tinggi. Jumlah penduduk miskin terbesar di Sulawesi Tengah berada di Kabupaten Parigi Moutong dan persentase jumlah penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Tojo Una-Una. Tabel 2 tersebut menunjukkan kondisi kemiskinan di Sulawesi Tengah pada tahun 2024.

Menjadi tantangan bagi pemerintah daerah Sulawesi Tengah, khususnya bagi pemimpin yang terpilih melalui pesta demokrasi yang baru selesai pada tahun 2024 ini untuk mengatasi masalah kemiskinan di daerah ini, yang mana pada tahun 2025 diprediksi kondisi kehidupan masyarakat khususnya di daerah Sulawesi Tengah dengan adanya kebijakan baru perpajakan seperti adanya PPn 12 persen serta pengenaan opsen pajak bagi kendaraan bermotor oleh daerah yang tentunya semakin memberatkan beban ekonomi rumah tangga terlebih bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menarik untuk dicermati mengenai kondisi kemiskinan di daerah Sulawesi Tengah pada dua tahun terakhir (2023 – 2024). Pada tabel 3, terlihat bahwa persentase kemiskinan ekstrim Masyarakat Sulawesi Tengah mengalami penurunan dari 1,44 persen menjadi 1,27 persen dari total penduduk miskin yang mencapai jumlah 379.760 jiwa. Hal ini tentu sebuah prestasi yang perlu diapresiasi dan patut untuk tetap dipertahankan agar semakin kecil jumlahnya bahkan jika memungkinkan ditekan hingga menjadi 0 persen.

Keberhasilan Pembangunan di daerah yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin jumlah Masyarakat miskin/miskin ekstrim menjadi berkurang. Hal ini dapat dilihat pada daerah Kabupaten Morowali yang pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, mencapai 20,34 persen tapi jumlah masyarakat yang miskin ekstrim juga mengalami peningkatan dari 0,73 persen menjadi 1,23 persen. Demikian pula untuk daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Buol dan Kabupaten Tolitoli, bahkan untuk Kabupaten Banggai yang pada tahun 2023 persentase miskin ekstrimnya 0 persen pada tahun 2024 meningkat

menjadi 1,15 persen, pertanyaannya mengapa hal tersebut terjadi? Adakah kebijakan Pembangunan yang diterapkan di daerah ini keliru sehingga dampak dari keberhasilan Pembangunan ekonomi belum berdampak secara nyata bagi kehidupan masyarakatnya, khususnya bagi daerah kabupaten yang persentase masyarakat miskinnya justru mengalami peningkatan.

Tabel 3. Kemiskinan Ekstrem Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2024

No	Nama Daerah	Jumlah Kemiskinan Ekstrem (%)	
		2023	2024
1	Provinsi Sulawesi	1,44	1,27
2	Banggai Kepulauan	1,87	1,41
3	Banggai	0,00	1,15
4	Morowali	0,73	1,23
5	Poso	1,80	1,33
6	Donggala	1,94	1,39
7	Toli-Toli	1,14	1,26
8	Buol	0,52	1,66
9	Parigi Moutong	2,41	1,32
10	Tojo Una-Una	1,31	2,16
11	Sigi	2,07	1,83
12	Banggai Laut	1,67	1,12
13	Morowali Utara	3,38	1,28
14	Kota Palu	0,58	0,36

Sumber: BPS, 2024

Faktor lain yang juga dapat dijadikan indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah angka/rasio beban ketergantungan. Pada tahun 2024 rasio ketergantungan (*dependency ratio*) Sulawesi Tengah berada pada angka 40,40 persen. Rasio ketergantungan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan penduduk usia produktif dengan penduduk usia nonproduktif. Rasio ketergantungan dihitung sebagai jumlah penduduk yang berumur 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas dibagi dengan jumlah penduduk berumur 15–64 tahun dikalikan 100. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan mengindikasikan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk dengan usia belum produktif dan tidak produktif lagi.

Hal ini menunjukkan bahwa beban bagi masyarakat yang memiliki pekerjaan atau usia produktif masih cukup tinggi dengan angka lebih dari 40 persen, menjadi

tantangan bagi pemerintah daerah untuk dapat menyediakan lapangan kerja yang ramah pada masyarakat lansia (64 tahun keatas) yang masih produktif untuk melakukan tindakan ekonomi guna menambah penghasilan keluarga sehingga beban ketergantungan tersebut dapat diturunkan

Angka pengangguran di Sulawesi Tengah relatif rendah (2,95 persen) pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan angka pengangguran nasional yang mencapai 5,32 persen pada tahun yang sama, namun beberapa daerah kabupaten di Sulawesi Tengah angka penganggurannya justru mengalami peningkatan seperti Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut serta Kabupaten Parigi Moutong.

Kebijakan Pemerintah

Berbagai kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka menurunkan angka kemiskinan melalui program-program prioritas pengentasan kemiskinan terus dilakukan. Upaya program multi sasaran dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem juga terus dilakukan melalui strategi kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
2. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Selain hal tersebut, sinergitas Pemerintah bersama instansi terkait yang termasuk dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah mengambil langkah yang strategis melalui berbagai intervensi baik melalui program multi sasaran maupun melakukan optimalisasi dan langkah antisipasi untuk pengendalian inflasi daerah antara lain melalui strategi 4K yaitu menjaga Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

1. Strategi Keterjangkauan Harga dilakukan dengan pemanfaatan anggaran belanja pemerintah dalam rangka menjaga stabilisasi harga.
2. Strategi menjaga Ketersediaan Pasokan dan keterjangkauan harga komoditas bahan makanan (bahan kebutuhan pokok) dengan mendorong program yang fokus pada pemenuhan pasokan pangan yang mudah diakses oleh masyarakat. Implementasi strategi ini dapat dilakukan melalui Gerakan Masyarakat (Germas) menanam komoditas penyumbang inflasi;

3. Kelancaran Distribusi dilakukan dengan mendorong dilakukannya kerjasama antar daerah (KAD) untuk pemenuhan pasokan komoditas pangan daerah dan digitalisasi pasar tradisional menjadi strategis untuk memperluas akses pasar para petani sekaligus mendorong efisiensi rantai distribusi;
4. Strategi komunikasi efektif untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat. Beberapa program komunikasi antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mengantisipasi terjadinya informasi asimetris terhadap perkembangan harga di pasar.

Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, pandangan yang dikemukakan oleh Friedrich List sejalan dengan kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah, yaitu mengembangkan dua sektor ekonomi utama yakni sektor pertanian dan industri, yang mana sektor pertanian diperlukan sebagai pemasok bahan pangan bagi Masyarakat, tetapi tidak bisa diandalkan dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Yang mampu membawa perekonomian pada tingkat yang lebih tinggi adalah sektor industri. Oleh karena itu industrialisasi merupakan Langkah awal untuk membawa perekonomian daerah kearah yang lebih maju (Arsjad: 60).

Sejalan dengan napa yang dikemukakan oleh List tersebut, maka kebijakan pemerintah daerah Sulawesi Tengah sudah sangat tepat dengan mengembangkan industri manufaktur di daerah Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (ini sudah terbukti), namun juga tetap mengembangkan sektor pertanian yang merupakan sektor yang menjadi tumpuan kehidupan mayoritas Masyarakat Sulawesi Tengah, dengan berbagai macam kebijakan guna meningkatkan produktifitas di bidang pertanian serta mengembangkan Kawasan Pangan Nusantara sebagai penyangga kebutuhan pangan nasional serta kebutuhan pangan daerah Sulawesi Tengah.

Kebijakan pemerintah yang pada tahun 2025 akan menyetop impor bahan pangan, menjadi cambuk bagi seluruh pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan produksi pangan guna mampu memenuhi kebutuhan Masyarakat dan industri yang ada di daerah ini.

Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah intervensi pemerintah/pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dalam bentuk keterlibatan aktif guna menghilangkan berbagai

macam distorsi dalam masyarakat sebagai dampak kurangnya keberpihakan yang selama ini dirasakan. Dimana pemerintah lebih cenderung berpihak kepada pihak swasta nasional dan daerah serta mengabaikan pelaku ekonomi masyarakat kecil dan kelompok ekonomi lemah.

Kebijakan tersebut dapat berupa kehadiran pemerintah/pemerintah daerah dalam berbagai bentuk, seperti kemudahan akses permodalan, subsidi terhadap harga-harga faktor produksi pertanian seperti pupuk, benih, pestisida ataupun alat-alat pertanian, pembebasan pajak produksi pertanian serta membangun sarana prasarana penunjang produksi sektor pertanian.

Untuk usaha kecil menengah, dapat dilakukan berbagai macam kebijakan dalam bentuk bantuan pemasaran hasil produksi hingga menjangkau pasar ekspor maupun bantuan permodalan serta kemasan.

Kinerja sektor industri perlu terus didorong melalui kemudahan berinvestasi bagi para pemodal yang berminat untuk menginvestasikan dananya di daerah ini melalui berbagai kemudahan dengan melakukan perombakan dalam sistem administrasi yang lebih sederhana dan cepat. Administrasi pemerintah yang kurang efisien dengan prosedur yang masih berbelit-belit dan proses kerja yang lambat menjadi sinyal negatif bagi iklim investasi di daerah yang perlu segera ditinggalkan.

Paradigma baru dalam pelaksanaan Pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat dilakukan melalui ;

1. Pengembangan usaha harus dilakukan sesuai dengan potensi dan kondisi penduduk setempat.
2. Mengembangkan Lembaga-lembaga ekonomi baru guna mendorong produktivitas daerah.
3. Keunggulan kompetitif yang dikembangkan di daerah harus mengacu kepada kualitas lingkungan.

Ketiga faktor tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi pengambilan keputusan dalam Tindakan perencanaan serta implementasi kebijakan dalam setiap langkah kebijakan pembangunan daerah.

Daftar Pustaka

1. Arsyad, Lincolin, 2016, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ke-5, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
2. Badan Pusat Statistik, 2024. *Sulawesi Tengah dalam Angka Tahun 2024*
3. BAPPEDA Sulawesi Tengah, 2024, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sulawesi Tengah Tahun 2024-2029*.
4. Suradi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Jurnal *Informasi*, Vol. 17, No. 03 Tahun 2012
5. Todaro, Michael P & Stephen C. Smith. 2011, *Economic Development* Eleventh Edition, England: Pearson Education Limited, United Kingdom.

Ucapan Terima Kasih

Hadirin yang terhormat,

Diakhir pidato ini perkenankanlah saya mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha kuasa. Saya menyadari bahwa dalam meraih jabatan Guru Besar yang pada hari ini Insya Allah akan dikukuhkan, tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah saya untuk mengungkapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia atas penetapan saya menjadi Profesor/Guru Besar dalam Bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako terhitung mulai tanggal 01 Desember 2024;
2. Rektor Universitas Tadulako Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T yang banyak membantu dalam proses pengusulan hingga terbitanya SK Guru Besar saya, serta para wakil rektor.
3. Ketua Senat Universitas Tadulako Prof. Dr. H. Djayani Nurdin serta seluruh anggota senat Universitas Tadulako.
4. Ketua Dewan Guru Besar Universitas Tadulako Prof. Dr. Ir. Fathurrahman, MP serta sekretaris Dewan Guru Besar Prof. Dr. Rosmala serta seluruh anggota Dewan Guru Besar Universitas Tadulako.
5. Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako Prof. Zainuddin Basri, P.hD serta seluruh anggota Dewan Pertimbangan.
6. Para Dekan dalam lingkungan Universitas Tadulako, Direktur Pascasarjana, Kepala Lembaga terkhusus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. M Iqbal, SE., M.Si Ak.
7. Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako Dr. Sulaeman Miru, S.E, M.Si.
8. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memfasilitasi proses pengusulan dan persetujuan pengangkatan Profesor/Guru Besar mulai dari Tingkat Prodi/jurusan dan Fakultas, rektorat Universitas Tadulako hingga Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Saintek atas bantuan dan dukungannya.
9. Terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada Prof. Dr. H. Abdullah Naser yang pertama menyampaikan SK Guru Besar saya, adinda M. Iqbal, S.E dan dinda Pricylia

Buntuang S.E., M.M yang terus memotivasi saya guna mengusul ke Japfung Guru Besar.

10. Kepada orang tua, Ayahanda H. Djabir Patombong (Alm) dan ibunda Hj. Hawadiah (Almh), istri tercinta Hj. Rospiah Dg. Parani, S.Pd, anak-anak terkasih, Dr. Husnul Hatimah, S.E., M.SA, Ak, Moh. Reza Assiddiq, S.T, serta Moh. Akhtar Danish yang terus memberikan dukunga, motivasi serta doa untuk keberhasilan saya.
11. Kepada ayah/ibu mertua (Alm/almrh), dan segenap keluarga besar serta sanak saudara yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat.
12. Kepada kakak-kakak saya yang selama ini telah memberi teladan serta membimbing saya sejak dari Sekolah Dasar yang hadir pada hari ini, kanda Prof. Dr. Jamiah Husain, Dra. Ulfiah DP, Ir. M.Taslim DP, MM, Dra. Fatmasuri serta Moh. Huffaz, DP, SH, M,Si.
13. Kepada rekan sejawat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan IESP, Prof. Dr. Charili Aanwar, Prof. Dr. Patta Tope, Dr. Ahlis Djirimu, Dr. Yunus Sading, Dr. Eko Jokoleleono, Dr. Armin Muis, Dr. Nudiatulhuda, serta rekan lainnya yang tidak sempat saya sebutkan, terrima kasih atas dorongan penyemangatnya, semoga interaksi kita terus berlanjut.
14. Segenap staf administrasi Universitas Tadulako dan staf administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terima kasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan selama ini.
15. Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas dukungan moril dan materil serta kerjasama yang baik selama ini sehingga saya dapat mengemban jabatan Guru Besar.
16. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian atas perhatian dan partisipasinya selama mengikuti acara ini, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, kesehatan dan keafiatan kepada kita sekalian.

Aamiin.

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS:

Nama : Muhtar Lutfi
Tempat/Tgl lahir : Ampana, 02 Pebruari 1968.
Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Ekonomi & Bisnis Univ.T adulako.
NIDN 0002026804
Jabatan Fungsional : Guru Besar
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I/IVB
NIP : 19680202 199303 1 002
Nama Istri : Hj. Rospiah Dg. Parani, S.Pd
Nama Anak : Dr. Husnul Hatimah, S.E., M.SA, Ak
Moh. Reza Assiddiq, S.T
Moh. Akhtar Danish. DP
Nomor Telepon/HP 081341022594
E-mail : fekonmuhtarlutfi@gmail.com

PENDIDIKAN:

- S1. Jurusan IESP Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, Lulus Tahun 1992.
- S2. Program Studi Ilmu Ekonomi dan Akuntansi Pascasarjana Universitas Pajajaran Bandung, Lulus Tahun 2001.
- S3. Program Doktor Ilmu Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar, Lulus Tahun 2014.

PENGALAMAN:

1. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako Periode 2017-2019.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako Periode 2019-2021

KARYA ILMIAH:

1. Analysis Of Leading Food Crop Commodities In Central Sulawesi Regencies/Cities In 2017-2021. Armin Muis¹; Muhtar Lutfi²; Nurnaningsih³; Ika Rafika⁴. *Jurnal Pamator* Vol. 15, No. 2, 2022, p. 340-356 <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator> ISSN: 2654-7856 (Online) ISSN : 1829 - 7935 (Print).
2. Assessing the Impact of Poverty, Malnutrition, and Household Income on Human Development In Central Sulawesi: A Panel Data Analysis: Sitti Rahmawati¹, Mudrajad Kuncoro², Yunus Sading³, Muhtar Lutfi⁴, Andi Herman Jaya⁵, Mochammad Fahlevi⁶, *Jurnal Of Infrastructure, Policy and Develoment*, (Online) ISSN : 2572-7931 (Print) 2572-7923, 2024.
3. Initial Study of the Palu-Parigi By-Pass Road Policy in Central Sulawesi Province, Indonesia, Mohamad Ahlis Djirimu¹, Yunus Sading², Muhtar Lutfi³, Vera Cicilia⁴, Andi Darmawati Tombolotutu⁴, *Jurnal Of Infrastructure, Policy and Develoment*, (Online) ISSN : 2572-7931 (Print) 2572-7923, 2024.
4. Social Capital and the Sustainability of KUD Business in Donggala District, Indonesia, *Journal of Asian Multicultural Research for Economy and Management Study*. ISSN: 2708-9711 Vol. 2 No. 4, 2021 (page 011-024).
5. The Impact of Production Factor and Costs on Income of Red Onion Farming Business in Sigi District, Central Sulawesi, Armin Muis¹, Muhtar Lutfi², Eko Jokolelono³, Nurnaningsih⁴, Ika Rafika⁵, Nuryana Dj Haprin⁶. *Agro Ekonomi*, Vol 34, Issue 1, June 2023, Page 25-41.

PENGHARGAAN

Satyalencana Karya Satya 10 Tahun